



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-10.KP.03.04 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : bahwa berdasarkan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pengangkatan pertama dan guna tertib administrasi maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Bidan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

10. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-10.KP.03.04 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Maret 2023

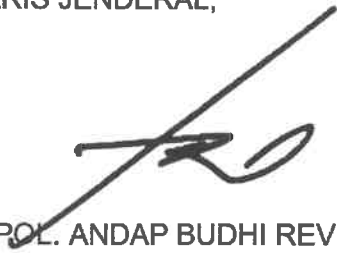
NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	DEVI KJ. SITUMORANG, A.Md.Keb NIP. 199405312022032007	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Medan	0
2.	NASRANI SULASTRI SINAGA, A.Md.Keb NIP. 199608252022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	0
3.	NADA AULIYA, A.Md.Keb NIP. 199902202022032002	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Batam	0
4.	FADHILAH SARI, A.Md.Keb NIP. 199206092020122001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang	0
5.	IKA MARLINASARI, A.Md.Keb NIP. 199509272022032004	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi	0
6.	MEI SINTA DWI ANGGRAINI, A.Md.Keb. NIP. 199805012022032005	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	0
7.	ITA NUR OKTAVIANI, A.Md.Keb NIP. 199810082022032002	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu	0
8.	ASIH NURIYANI, A.Md.Keb. NIP. 199310232022032003	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	0
9.	RISDA NURIMANDA, A.Md.Keb NIP. 199110102022032002	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	0
				10...

1	2	3	4	5
10.	JUNIATUN MA'MUROH, A.Md.Keb. NIP. 199206282022032003	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	0
11.	GINA PRATIWI DWI ARIFIN, A.Md.Keb. NIP. 199306162022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	0
12.	SUCI NOVIANTI, A.Md.Keb. NIP. 199311232022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung	0
13.	NI PUTU AYU RATNA DEWI NIP 199507142022032004	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung	0
14.	KASRAWITA KRISHNA MURTI OCTAVIANI, A.Md.Keb NIP. 199410102022032007	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandung	0
15.	UUN UNDIARTI, Amd.Keb. NIP. 199103162022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0
16.	AZZAHRA DESIANA PUTRI W., A.Md.Keb. NIP. 199412112022032002	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Semarang	0
17.	FIRMIANISA, A.Md.Keb NIP. 199512062022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya	0
18.	DWI WAHYU NURUL ANGGRAINI, A.Md.Keb. NIP. 199412122022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Surabaya	0
19.	PUTRI CHAHYANI, A.Md.Keb. NIP. 199906202022032010	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Kupang	0
20.	PUJI SETYANING TIYAS, Amd. Keb. NIP. 199312052022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Gorontalo	0
21.	DWINTA KUSUMA RAHAYU, Amd. Keb. NIP. 199201142022042002	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mamuju	0
				22...

1	2	3	4	5
22.	DYAH AYU WELLA DAGUSTA, A.Md.Keb. NIP. 199408262022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon	0
23.	PURNOMOSARI, A.Md.Keb. NIP. 198908072022032001	Pengatur (II/c)	Bidan Pelaksana/Terampil pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura	0



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,



KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.